



Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Toili Jaya Kabupaten Banggai 2022**Abdul Rachman Saida¹ Istiqamah Bungana²**

¹ Ilmu Administrasi Negara Universitas Tompotika Luwuk, Email: (rahmansaida23@gmail.com)

² Ilmu Administrasi Negara Universitas Tompotika Luwuk, Email: (istiqamahbungana2001@gmail.com)

ABSTRAK

Penelitian ini adalah jenis kualitatif deskriptif, jumlah informan 11 orang, terdiri 1 pegawai Kantor Camat Toili Jaya, 7 Kepala Desa yang ada di Kecamatan Toili Jaya, dan 3 Tokoh Masyarakat, dengan menggunakan teknik *Snowball Sampling*. Penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Toili Jaya Kabupaten Banggai belum efektif dan efisien. Didukung adanya fakta di lapangan, bahwa implementasi pengelolaan sampah di Kecamatan Toili Jaya masih bersifat informal dan terbatas kesadaran masyarakat serta inisiatif individu maupun kelompok. Ketiadaan regulasi resmi menyebabkan kurangnya koordinasi, fasilitas, dan pengawasan memadai sehingga berdampak pada efektivitas pengelolaan sampah. Adapun distribusi bantuan kendaraan roda tiga tidak merata menjadi kendala utama dalam efektivitas pengangkutan sampah, sehingga beberapa area masih mengalami penumpukan sampah berdampak kebersihan dan kesehatan masyarakat. Penelitian merekomendasikan perlunya penyusunan regulasi kebijakan pengelolaan sampah ditingkat kecamatan sebagai dasar hukum, peningkatan sosialisasi serta partisipasi masyarakat, dan penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kecamatan Toili Jaya.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan Sampah**ABSTRACT**

This research is a descriptive qualitative type, the number of informants is 11 people, consisting of 1 employee of the Toili Jaya Sub-district Office, 7 Village Heads in Toili Jaya Sub-district, and 3 Community Leaders, using the Snowball Sampling technique. The study shows that the Implementation of Waste Management Policy in Toili Jaya Sub-district, Banggai Regency has not been effective and efficient. Supported by facts in the field, that the implementation of waste management in Toili Jaya Sub-district is still informal and limited by public awareness and individual and group initiatives. The

absence of official regulations causes a lack of coordination, facilities, and adequate supervision, which has an impact on the effectiveness of waste management. The uneven distribution of three-wheeled vehicle assistance is a major obstacle in the effectiveness of waste transportation, so that some areas still experience waste accumulation that impacts public hygiene and health. The study recommends the need to compile waste management policy regulations at the sub-district level as a legal basis, increase socialization and community participation, and strengthen coordination between stakeholders to improve the quality of the environment in Toili Jaya Sub-district.

Keywords: *Implementation, Policy, Waste Management*

PENDAHULUAN

Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Pengertian implementasi yang berdiri sendiri sebagai kata kerja yang dapat ditemukan dalam konteks penelitian ilmiah. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan (Magdalena et al., 2021). Penerapan kebijakan ini melibatkan proses yang meliputi pengesahan peraturan perundangan, pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana, kesiapan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan, serta dampak nyata keputusan baik yang diharapkan maupun tidak. Dalam persiapan implementasi, perlu memastikan ketersediaan sumber daya, rencana, dan arahan yang dapat diterima serta dijalankan oleh pihak terkait (Sufi, 2021).

Sampah merupakan permasalahan utama yang dihadapi Indonesia terutama di kota-kota besar yang memiliki tingkat aktivitas dan kepadatan tinggi serta pembangunan infrastruktur yang pesat. Permasalahan pengelolaan sampah tidak hanya terjadi di kota-kota besar, tetapi juga di kota-kota kecil hingga ke pedesaan. Salah satunya adalah di Kecamatan Toili Jaya.

Pada hal ini diperparah dengan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian sekitar dengan tidak membuang dan membakar sampah sembarangan. Kurangnya kesadaran masyarakat disebabkan kurang maksimalnya komunikasi pemerintah setempat tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat belum maksimal. Kenyataan yang saya dapat pada saat di lapangan belum semua masyarakat Kecamatan Toili Jaya mengetahui adanya Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah.

Sampah adalah sisa suatu usaha atau kegiatan (manusia) yang berwujud padat (baik berupa zat organik maupun anorganik yang bersifat dapat terurai maupun tidak terurai) dan dianggap sudah tidak berguna lagi sehingga dibuang ke lingkungan. Sampah terbagi dari mudah membusuk dan tidak mudah membusuk. Sampah membusuk terutama terdiri atas zat-zat organik seperti sisa sayuran, sisa daging, daun, sedangkan

yang tidak membusuk dapat berupa plastic, kertas, karet, logam, dan bahan bangunan bekas. (Fiqih et al., 2021)

Pengertian sampah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi baik domestic (rumah tangga) maupun industri. Dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semipadat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang ke lingkungan. Peraturan tersebut ditindak lanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 5 Tahun 2018 yang mengatur Tentang Pengelolaan Sampah.

Menurut (Aqmalia et al., 2020) menyatakan ada beberapa faktor yang menyebabkan permasalahan sampah di Indonesia semakin rumit adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tidak disertai dengan keselarasan pengetahuan tentang sampah dan juga partisipasi masyarakat yang kurang untuk memelihara kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Pengelolaan sampah di Indonesia telah diatur dalam “Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah” (UU No 18/2008), dimana didalamnya dijelaskan cara pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir agar dapat memberikan manfaat yang optimal, baik dari kebersihan dan keindahan lingkungan, kesehatan masyarakat, ekonomi, dan selanjutnya dapat mengedukasi masyarakat untuk berperilaku peduli pada permasalahan sampah dan lingkungan. Selain itu, dengan UU No 18/2018 juga “memberikan kepastian hukum, pembagian tanggung jawab dan kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien” (Pemerintah dan DPR RI, 2008).

Pengelolaan sampah adalah tanggung jawab pemerintah yang diwujudkan dalam bentuk pelayanan melalui pengembangan kebijakan pengelolaan sampah. Keberadaan kebijakan pengelolaan sampah belum tentu efektif dalam menyelesaikan masalah pengelolaan sampah. Sering kali, instansi dan organisasi yang bertanggung jawab dalam proses pengelolaan sampah memiliki kapasitas yang relatif rendah, sehingga pengelolaan sampah menjadi tidak efektif dan berdampak negatif pada kesehatan dan lingkungan.

Pokok permasalahan yang akan diteliti untuk diteliti yaitu: a. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah kecamatan Toili Jaya dalam pengelolaan sampah ? b. Bagaimana sikap pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kesadaran akan kebersihan lingkungan di kecamatan Toili Jaya? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: a. Peran pemerintah kecamatan Toili Jaya dalam pengelolaan sampah. b. Sikap pemerintah dan masyarakat dalam menjaga kesadaran akan kebersihan lingkungan kecamatan Toili Jaya. Manfaat penelitian pemikiran dan memperkaya teori-

teori kesejahteraan sosial serta konsep praktik pekerjaan sosial mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu peneliti berusaha menjelaskan atau mendeskripsikan secara terperinci dan mendalam tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Toili Jaya Kabupaten Banggai. Informan adalah narasumber yang merujuk pada seseorang yang paham terkait dengan objek penelitian serta mampu memberikan penjabaran tentang topik penelitian yang diangkat (Hutapea et al., 2021). Maka dari itu, penentuan informan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan prosedur Snowball Sampling, yaitu penentuan informan yang pada awalnya jumlahnya sedikit kemudian menjadi membesar, hal ini dikarenakan sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari informan lain yang digunakan sebagai sumber data (Ghufron & Dewi, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Toili Jaya Kabupaten Banggai

Model implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier (Cendekia Jaya & Syahriawati, 2020) berpendapat bahwa, peran penting dari analisis implementasi kebijakan adalah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi dengan mengklasifikasikan dalam tiga variabel, yaitu : (1) Masalah kebijakan, (2) Karakteristik Kebijakan, (3) Lingkungan Kebijakan.

1. Masalah Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah proses menerjemahkan keputusan atau kebijakan yang telah dibuat menjadi tindakan nyata di lapangan. Masalah kebijakan yaitu, mudah tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dari teknis pelaksanaan, keragaman objek dan perubahan yang dikehendaki.

Hingga saat ini Kecamatan Toili Jaya belum memiliki kebijakan pengelolaan sampah yang resmi dan terperinci. Kondisi ini menyebabkan pemahaman masyarakat, termasuk di Desa Marga Kencana, masih terbatas dan kebijakan yang ada belum jelas serta konkret untuk dilaksanakan di tingkat desa. Selain itu, belum terdapat aturan teknis dan prosedur yang mendukung pelaksanaan pengelolaan sampah, sehingga diperlukan penyusunan kebijakan dan pedoman yang jelas agar pengelolaan sampah dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.

Kesimpulan secara keseluruhan terkait masalah kebijakan peneliti dapat menyimpulkan, Kecamatan Toili Jaya hingga saat ini belum memiliki kebijakan

pengelolaan sampah yang resmi dan menyeluruh yang dapat dijadikan pedoman operasional ditingkat kecamatan maupun desa. Pemahaman terkait isi dan tujuan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat kecamatan dan desa masih sangat minim dan belum terstruktur dengan baik. Hal ini disebabkan ketiadaan regulasi dan pedoman teknis yang jelas dan terpadu untuk tata kelola sampah di wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Banggai telah menunjukkan perhatian dengan membangun fasilitas TPS 3R di Desa Marga Kencana sebagai langkah awal pengelolaan sampah terpadu. Kondisi ini menandakan perlunya percepatan penyusunan regulasi, pedoman teknis, dan prosedur pelaksanaan yang komprehensif agar pengelolaan sampah di Kecamatan Toili Jaya dapat berjalan efektif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan sesuai prinsip TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Sinergi antarpemangku kepentingan di tingkat kecamatan, desa, dan kabupaten sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan pengelolaan sampah yang sehat dan bersih bagi masyarakat dan lingkungan.

2. Karakteristik Kebijakan

Karakteristik kebijakan, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis di antara lembaga pelaksana, aturan dan lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar, dan variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosial ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi serta komitmen dan kualitas kepemimpinan dan pejabat pelaksana.

Kesimpulan secara keseluruhan terkait masalah kebijakan peneliti dapat menyimpulkan, bahwa kesiapan dan kemampuan petugas pengelolaan sampah di Kecamatan Toili Jaya secara umum masih terbatas, terutama karena belum adanya kebijakan resmi dan pelatihan khusus sebagai landasan operasional. Pengetahuan petugas tentang tugas dan tanggung jawab sudah cukup memadai di beberapa desa yang mendapatkan dukungan alat dari Dinas Lingkungan Hidup berupa kendaraan roda tiga (motor Viar), dan mereka secara rutin melakukan pengumpulan serta pengangkutan sampah. Motivasi dan komitmen petugas cukup tinggi, didorong oleh kesadaran akan pentingnya kebersihan lingkungan dan dukungan fasilitas, namun pengelolaan sampah di lapangan masih bersifat manual, belum optimal, dan sangat bergantung pada inisiatif individu serta dukungan terbatas dari regulasi dan program peningkatan kapasitas. Upaya pembinaan formal dan sosialisasi yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme dan efektivitas pengelolaan sampah sehingga tujuan kebijakan pengelolaan sampah yang sistematis dan berkelanjutan dapat terwujud di wilayah ini.

3. Lingkungan Kebijakan

Lingkungan kebijakan merupakan tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan yaitu pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan objek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata dan akhirnya mengarah kepada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

Berdasarkan wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa, desa tersebut belum memiliki kebijakan pengelolaan sampah yang jelas. Faktor sosial dan budaya berperan penting, dimana rendahnya kesadaran masyarakat menyebabkan kesulitan dalam membentuk perilaku tertib pengelolaan sampah. Dari sisi ekonomi, keterbatasan pendapatan masyarakat menjadikan pengelolaan sampah bukan prioritas utama. Dukungan politik dan kebijakan dari pemerintah daerah dianggap belum memadai karena tidak adanya arahan dan program konkret yang mendukung pengelolaan sampah secara efektif. Hambatan eksternal utama yang dihadapi meliputi kekurangan fasilitas dan infrastruktur pengelolaan sampah, serta minimnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam bidang ini. Secara keseluruhan, keberhasilan pengelolaan sampah di Desa Mekar Kencana membutuhkan peningkatan kesadaran masyarakat, dukungan kebijakan yang jelas dari pemerintah, dan penguatan fasilitas serta sumber daya manusia.

2) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Toili Jaya Kabupaten Banggai

Merujuk pada konsep implementasi, bahwa implementasi adalah upaya untuk mengukur keberhasilan suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan non pemerintah untuk mengelola, menyelenggarakan, dan mengatur segala urusan bersama guna mencapai hasil yang efektif dan efisien. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Toili Jaya Kabupaten Banggai. Menurut George C. Edwards III menurut Winarno (Nopralia et al, 2020) berpendapat bahwa, dalam pendekatan ini terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi dalam suatu kebijakan yaitu : (1) Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) Disposisi, (4) Struktur Birokrasi.

1. Komunikasi

Menurut Edwards III, untuk menentukan keberhasilan tujuan pelaksanaan kebijakan publik diperlukan komunikasi yang baik. Untuk menghasilkan implementasi yang efektif pengambilan keputusan harus mengetahui setiap tugas yang akan mereka lakukan. Pengetahuan tentang tugas mereka akan sangat berguna demi berjalannya implementasi sesuai yang diharapkan. Selain itu, isi kebijakan harus dikomunikasikan secara jelas kepada sasaran kebijakan. Ada tiga indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi.

- a. Dimensi transmisi menuntut agar proses pendistribusian komunikasi kebijakan publik dijalankan dengan baik dan mengarah pada implementasi yang baik. Dimensi transmisi berharap tidak terjadi kesalahpahaman karena perbedaan jenjang birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi.
- b. Dimensi kejelasan menginginkan agar komunikasi yang diterima oleh

pelaksana kebijakan jelas dan tidak membingungkan (ambigu). Informasi mengenai kebijakan dikomunikasikan dengan jelas kepada pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, dan pemangku kepentingan agar dapat mencapai Tujuan implementasi secara efektif dan efisien.

- c. Dimensi konsistensi menginginkan perintah yang diberikan harus dilaksanakan secara konsisten. Perubahan perintah dapat membingungkan pelaksana dilapangan.

Berdasarkan beberapa pendapat, maka secara keseluruhan komunikasi dalam pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Sampah sudah terlaksana dengan baik. Dari dimensi kejelasan yaitu informasi yang disampaikan oleh pihak Kecamatan terhadap desa-desa sudah jelas yaitu tentang Kebijakan Pengelolaan sampah. Dari dimensi konsisten informasi yang disampaikan selalu sama dan tidak berubah-ubah hanya saja tidak konsisten waktu pelaksanaannya. Komunikasi sangat menentukan berhasil atau tidaknya implementasi suatu kebijakan. Implementasi yang efektif akan terjadi jika komunikasi yang dilakukan sudah efektif dan efisien. Oleh karena itu isi kebijakan harus didistribusikan dengan jelas dan konsisten guna meminimalisir terjadinya distorsi implementasi seperti yang dikemukakan oleh Edward III (Subarsono, 2021). Komunikasi merupakan hal penting dalam implementasi namun komunikasi yang benar-benar sempurna sebetulnya merupakan suatu kondisi yang sulit dilakukan. Namun hal ini bisa diatasi dengan memaksimalkan segala hal yang bisa dilakukan. Tentu, tidak akan ada pemerintah maupun organisasi yang bisa bekerja sempurna. Selalu ada kelemahan, namun demikian harus meminimalisasi kesalahan dari hal-hal yang sesungguhnya bisa diantisipasi sejak dini. Salah satu yang bisa diantisipasi adalah koordinasi komunikasi.

2. Sumber Daya

Sumber daya adalah alat yang digunakan dalam menentukan keberhasilan kebijakan dalam implementasi. Sumber daya baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Kesimpulan secara keseluruhan yaitu sumber daya yang tersedia di Kecamatan Toili Jaya belum sepenuhnya maksimal. Dari segi sumber daya sudah mumpuni hal ini dibuktikan dengan ada beberapa jumlah petugas kebersihan yang dipekerjakan. Sedangkan dalam hal sumber daya peralatan angkutan sampah masih kurang karena bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup berupa kendaraan tiga roda (motor viar) belum sepenuhnya merata di desa-desa yang ada di Kecamatan Toili Jaya. Edward III dalam (Pratiwi, 2018) berpendapat bahwa meskipun isi kebijakan dikomunikasikan jelas dan konsisten tapi bila tidak didukung dengan sumber daya yang memadai maka implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya yang dimaksud yakni sumber daya manusia maupun sumber daya peralatan. Sumber daya adalah faktor penting demi tercapainya implementasi kebijakan yang efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal dikertas dan menjadi dokumen saja.

3. Disposisi

Salah satu faktor penting dalam berjalannya implementasi adalah disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Jika implementasi kebijakan diharapkan berjalan efektif, maka peran implementor harus memiliki keinginan serta kecenderungan sikap positif untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kesimpulan secara keseluruhan terkait disposisi adalah karakteristik atau watak setiap masyarakat beragam. Dan disposisi sangat memegang peran penting dalam proses implementasi kebijakan sesuai yang dikatakan dengan oleh Edward III dalam (Subarsono, 2021) yaitu apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi kebijakan agar menjadi tidak efektif. Berdasarkan hasil keseluruhan wawancara, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di tingkat kecamatan dan desa menunjukkan beragam tingkat komitmen, namun secara umum terdapat kesadaran yang signifikan dari aparatur pemerintah dalam menjalankan program tersebut. Di tingkat kecamatan Toili Jaya, staf kecamatan menunjukkan tanggung jawab yang baik dalam mendukung kebijakan pengelolaan sampah, meskipun mekanisme insentif dan sanksi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat belum diterapkan, sehingga perlu penguatan mekanisme pengendalian dan motivasi untuk meningkatkan efektivitas program. Di tingkat desa, sebagian besar aparatur desa menunjukkan komitmen yang kuat dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah, dengan upaya aktif mendukung dan mendorong program tersebut demi terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Beberapa kepala desa, seperti di Mekar Kencana dan Marga Kencana, menggarisbawahi pentingnya inovasi yang terkait dengan aspek kesehatan masyarakat sebagai bagian dari pengelolaan sampah. Sementara itu, Kepala Desa Tolisu memandang pengelolaan sampah sebagai kewajiban bersama masyarakat dan pemerintah desa, dengan fokus pada peningkatan partisipasi melalui sosialisasi pemilahan sampah organik dan non- organik serta kerja sama dengan mitra terkait. Secara keseluruhan, komitmen aparatur desa dan kecamatan dalam pengelolaan sampah hadir dalam bentuk kesadaran tanggung jawab, dukungan terhadap inovasi, dan pelaksanaan program secara konsisten. Namun, penguatan aspek mekanisme insentif, sanksi, dan peningkatan partisipasi masyarakat masih menjadi kebutuhan penting untuk mendukung keberlanjutan dan efektivitas kebijakan pengelolaan sampah ditingkat lokal.

4. Struktur Birokrasi

Aspek struktur birokrasi mencakup hal-hal yang sangat penting yaitu terkait mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*standard operating procedures*

atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Toili Jaya, belum berjalan secara optimal dan menyeluruh. Hal ini terlihat dari fakta bahwa beberapa desa di Kecamatan Toili Jaya belum melaksanakan pengelolaan sampah secara terencana dan terkoordinasi. Bahkan, terdapat beberapa desa yang hingga kini belum mendapatkan bantuan kendaraan pengangkut roda tiga dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk mendukung proses pengumpulan dan pengangkutan sampah. Kondisi ini mengakibatkan sebagian besar desa di Kecamatan Toili Jaya masih mengelola sampah secara individual atau mandiri oleh warga desa masing-masing, tanpa adanya sistem pengelolaan terpadu yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sampah. Situasi ini menunjukkan perlunya peningkatan dukungan sarana dan prasarana serta penguatan kapasitas kelembagaan desa dalam rangka mewujudkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang lebih optimal dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Toili Jaya masih sangat terbatas dan belum terstruktur karena belum adanya kebijakan resmi di tingkat kecamatan. Pengelolaan sampah baru berjalan sporadis di sebagian kecil desa, dengan keberadaan petugas kebersihan dan bantuan kendaraan roda tiga dari Dinas Lingkungan Hidup yang masih sangat terbatas. Kondisi ini mencerminkan rendahnya pemerataan dalam pengelolaan sampah, yang berdampak pada efektivitas pengelolaan sampah di wilayah tersebut. Selain itu, keterbatasan sumber daya, kurangnya regulasi formal, serta partisipasi masyarakat yang belum optimal menjadi faktor utama yang menghambat pengelolaan sampah secara menyeluruh.

Hal ini sesuai dengan Teori Mazmanian & Sabatier yang menyatakan bahwa efektivitas implementasi kebijakan sangat bergantung pada faktor-faktor seperti kejelasan kebijakan, dukungan sumber daya, serta komitmen pelaksana dan masyarakat. Kurangnya kebijakan formal dan minimnya sumber daya menghambat tercapainya tujuan pengelolaan sampah secara efektif. Selain itu, sesuai dengan Teori Edward III yang menekankan pentingnya struktur dan perilaku organisasi dalam pelaksanaan kebijakan, koordinasi yang belum optimal antar lembaga pemerintah dan keterbatasan kapasitas organisasi di tingkat desa menjadi tantangan signifikan. Minimnya dukungan politik dan regulasi yang jelas menyebabkan rendahnya motivasi dan kapasitas pelaksana dalam mengelola sampah secara sistematis.

SARAN

Mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Toili Jaya Kabupaten Banggai, yang saat ini belum memiliki kebijakan resmi dan pengelolaan sampahnya belum merata, dengan hanya beberapa desa yang memiliki petugas kebersihan serta mendapatkan bantuan kendaraan pengangkut dari Dinas Lingkungan Hidup, adalah sebagai berikut. Pemerataan fasilitas dan sumber daya menjadi hal

penting, dengan pengadaan petugas kebersihan di semua desa serta peningkatan jumlah dan kualitas kendaraan pengangkut sampah. Selain itu, peningkatan kapasitas dan pelatihan bagi petugas kebersihan dan aparat terkait sangat diperlukan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan pengelolaan sampah. Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat juga harus ditingkatkan melalui edukasi, sosialisasi, dan kampanye pengelolaan sampah yang baik, khususnya penerapan prinsip TPS 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Koordinasi antar lembaga pemerintahan dan pemangku kepentingan lain perlu diperkuat agar pelaksanaan pengelolaan sampah berjalan terintegrasi dan efisien. Terakhir, penyediaan anggaran yang memadai dan kemitraan strategis dengan swasta dan komunitas menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan program pengelolaan sampah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 *Tentang Pengelolaan Sampah*. 2008. Pemerintah dan DPR RI.
- Aqmalia, R., Anwary, A. Z., & Jalpi, A. (2020). Hubungan Domain Perilaku Dengan Pengelolaan Sampah di Balitbangda Balangan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 30.
- Fiqih, M. N., Syaiful, S., & Aminda, R. S. (2021). Penempatan Bak Sampah Organik, Anorganik, Dan B3 Dengan Konsep Go Green Perumahan Budi AgungRwo3/Rt 05.*JurnalPengabdianMasyarakatUIKAJaya:SINKRON*, 1(2), 71. <https://doi.org/10.32832/jpmuj.v1i2.1907>
- Ghufron, M. I., & Dewi, R. (2021). Analisis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Perspektif Al- Qur'an. *PROFIT: JurnalKajianEkonomiDan Perbankan Syariah*, 7(2),65–84. <https://doi.org/10.33650/profit.v7i2.7195>
- Hutapea, S., Besti,), & Simbolon, R. (2021). Strategi Komunikasi Pemasaran Dalam Menarik Minat Pemasang Iklan Radio Kiss Fm Medan Pada Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 6(2), 128–137.
- Magdalena, I., Salsabila, A., Krianasari, D. A., & Apsarini, S. F. (2021). Implementasi Model Pembelajaran Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 Di KelasIiSdnSindangsariIii.*JurnalPendidikanDanDakwah*,3(1),119–128.<https://ejournal.stitpn.ac.id/index.php/pandawa>
- Sufi, I. F.(2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai. 155.